



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG : EKSEKUTIF**

**LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **WENDRAWAN PONTJO PUTRO**
2. Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN**
3. NHK : **405474**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.357.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/4.041 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HASIL SENDIRI Rp. 311.500.000
2. Tanah Seluas 297 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 33.500.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 138 m2/138 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 1.012.500.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp. 448.200.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 2.700.000
2. MOBIL, HONDA JEEP Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 390.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
5. MOTOR, HONDA SCOOPY SEPEDA MOTOR Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 22.500.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** **Rp. 179.515.700**

**D. SURAT BERHARGA** **Rp. ---**

**E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp. 27.610.760**



## F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

## Sub Total

Rp. 2.012.826.460

## III. HUTANG

Rp. 477.962.722

## IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.534.863.738

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.